BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti SAP sebelumnya, yaitu PP No 24 Tahun 2005, tentang kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset pemerintah. Salah satunya adalah penyusutan Aset Tetap pemerintah sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 7 tentang Aset Tetap. SAP dinyatakan dalam bentuk pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dilengkapi dengan pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih banyak menyoroti pengelolaan Aset Tetap dan permasalahannya, bahkan menjadi dasar untuk mengkualifikasi laporan keuangan. Bila ruang lingkup pemeriksaan sampai pada penerapan penyusutan aset, besar kemungkinan akan berdampak negatif pada perubahan opini atas laporan keuangan yang disajikan pemerintah.

Aset tetap atau barang milik daerah merupakan salah satu faktor yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Keberadaan aset tetap sangat mempengaruhi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan, oleh karena itu, sistem atas manajemen/pengelolaan aset tetap daerah harus handal sebagai alat untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan/pengelolaan, dan sistem pengawasannya.Sistem pengawasan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Daerah Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sejak Tahun 2016 berpedoman pada RKPD Kabupaten Situbondo Nomor 71 Tahun 2016 tanggal 18 Nopember 2016. Hal ini berkaitan dengan akuntansi.

Akuntansi merupakan bagian dari sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan yang relevan. Mengingat pentingnya sistem informasi tersebut maka setiap perusahaan atau lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan adanya pelaporan pertanggung jawaban keuangan dituntut untuk memiliki suatu sistem informasi yang baik. Salah satu bagian akuntansi yang memiliki faktor yang cukup besar dan memiliki andil untuk menghasilkan laporan keuangan adalah aset tetap.

PSAP No.07 menyebutkan bahwa penghentian pengakuan aset tetap berwujud dilakukan ketika dilepas atau ketika tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Pernyataan ini membatasi perlakuan akuntansi ketika terjadi penghentian pengakuan. Berdasarkan beberapa perlakuan akuntansi terhadap aset tetap berwujud, maka maka dapat

dilakukan penyajian aset tetap berwujud dalam laporan keuangan. Aset tetap yang dimiliki oleh dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo ada pada tabel berikut ini:

No	Nama Bidang Barang
1	**TANAH**
2	**PERALATAN & MESIN** Alat-alat Besar Alat-alat Angkutan Alat-alat bengkel dan alat ukur Alat-alat Pertanian / Peternakan Alat-alat kantor dan rumah tangga Alat-alat Studio dan Komunikasi Alat-alat Kedokteran Alat-alat Laboratorium Alat-alat Keamanan
3	**GEDUNG & BANGUNAN** Bangunan Gedung Bangunan Monumen
4	**JALAN, IRIGASI & JARINGAN** Jalan dan Jembatan Bangunan Air / Irigasi Instalasi Jaringan
5	**ASET TETAP LAINNYA** Buku Perpustakaan Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan Hewan Ternak dan Tumbuhan
6	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Untuk penyusutan setelah aset tetap diperoleh dengan cara langsung maupun tidak langsung melalui kontrak perjanjian, setelah adanya kontrak perjanjian tersebut kemudian aset tetap dicatat pada neraca kemudian disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus. Penyusutan ini dilakukan oleh pihak bagian laporan keuangan menyusutkan sesuai dengan SAP No.07 berbasis akrual. Sehingga nantinya tercatat di neraca sesuai dengan perhitungan penyusutannya dengan harga perolehannya sesuai dengan SAP.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini merupakan dinas yang memiliki tugas sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum, pembangunan infrastruktur dan perumahan untuk daerah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Terkait dengan wewenang tersebut, maka melalui kantor

ini beberapa surat perizinan diproses. Beberapa surat tersebut seperti izin Pemanfaatan Ruang (IPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Melalui kedinasan ini pula urusan pembebasan lahan proyek infrastruktur pemerintah dilakukan. Pencatatan aset di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini mengikuti dengan apa yang sudah ada dalam SAP No.07.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian seperti yang dilakukan oleh Harianja (2008) berjudul: Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir telah menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Permendagri No.13 Tahun 2006 yang dimulai untuk tahun anggaran 2007.

Permasalahan yang ada pada Dinas PUPR adalah terjadi ketidak sesuaian dengan SAP No.07 yaitu, dari penyajian Laporan Keuangan. Menurut narasumber Dinas PUPR sudah berbasis akrual. Namun, pada kenyataannya laporan keuangan dalam penyajiannya berbasis kas.

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan aset tetap yang diterapkan perusahaan secara langsung. Maka dari itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut:

"Penerapan Akuntansi Aset Tetap berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No.07 Tentang Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Situbondo".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan akuntansi aset tetap pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimanakah kesesuaian akuntansi Aset tetap berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 tentang aset tetap pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Situbondo?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi aset tetap pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan pemikiran dan pemahaman yang lebih memperkaya teori-teori atau menambah pengetahuan tentang aset tetap untuk kedepannya, agar dapat lebih memperluas pemahaman tentang standar akuntansi pemerintahan terutama tentang aset tetap.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi penulis

   Menambah dan memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai penerapan akuntansi aset tetap pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo.

   b. Bagi Akademik

   Hasil penelitian ini secara praktik diharapkan dapat menambah pemikiran terhadap pemahaman tentang aset tetap pada keuangan dinas Pekerjaan Umum kedepannya untuk menjadi acuan bagi mahasiswa kedepannya lebih baik lagi dan selanjutnya hasil penelitian ini bisa memotivasi penyusun peneliti selanjutnya untuk lebih mengembangkan teori penelitian.

3. Manfaat bagi dinas PUPR

   a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan kebijakan pada masa yang akan datang.
   b. Penelitian dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyusun strategi pengembangan sistem penilaian pelayanan yang berjalan.

4. Bagi Pihak Lain / Pembaca

   Memberikan wawasan baru dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca sebagai sumber informasi dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak lain khususnya yang sedang melakukan penelitian pada bidang yang sama.